

**JAWABAN DAN TAMBAHAN PENJELASAN ATAS
PERTANYAAN, SARAN, HIMBAUAN DAN PENDAPAT FRAKSI-
FRAKSI DPRD KABUPATEN KEBUMEN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Ysh. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen, Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, Kepala Kepolisian Resor Kebumen, dan Komandan Kodim 0709 Kebumen atau yang mewakili.

Ysh. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Asisten Sekda, Para Staf Ahli Bupati, Sekretaris DPRD, Para Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Kepala Satpol PP, para Kepala Bagian, dan para Camat se Kabupaten Kebumen, wartawan media cetak maupun elektronik, hadirin peserta Rapat Paripurna DPRD serta pendengar Radio In FM yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Alloh Subkhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga pada hari ini, Rabu tanggal 21 September 2022 kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal afiat tiada halangan suatu apapun.

Pimpinan Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Selanjutnya tentang jawaban kami sampaikan dengan tata urutan sebagai berikut :

I. JAWABAN / TANGGAPAN DAN TAMBAHAN PENJELASAN ATAS PERTANYAAN, SARAN, HIMBAUAN SERTA PENDAPAT DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT-RAPAT PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI.

A. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Nasdem

1. Terhadap pandangan Fraksi Partai Nasdem atas potensi PAD Kebumen yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan, namun masih belum optimal dalam realisasinya, kami sampaikan terimakasih atas masukannya, bahwa kami akan terus berupaya agar realisasi PAD meningkat setiap tahun dengan mengidentifikasi dan menggali potensi PAD mendasarkan pada regulasi, mengoptimalkan digitalisasi pendapatan, kinerja dan meningkatkan sumber daya manusia pengelola pendapatan.
2. Atas permintaan penjelasan Fraksi Partai Nasdem terhadap upaya dan target peningkatan kualitas SDM sebagai pendukung pengembangan pertanian, UMKM serta pariwisata, kami sampaikan sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kualitas SDM pada sektor pertanian dilakukan melalui pembinaan, bimtek dan sosialisasi kepada para petani dan penyuluh pertanian yang

- dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan sekolah lapang pertanian dan pembinaan gapoktan;
- b. Peningkatan kualitas SDM pada UMKM dilakukan melalui program Sidawir (Inkubasi Pemuda Wirausaha) untuk menciptakan wirausaha yang mandiri dan menghasilkan produk UMKM yang lebih bersaing; serta
 - c. Peningkatan kualitas SDM pada sektor pariwisata dilakukan melalui pola kemitraan antar pemerintah daerah dan swasta, dibentuknya desa wisata/pokdarwis, pelatihan untuk pelaku usaha dan pedagang di obyek wisata dan sertifikasi kompetensi pelaku usaha pariwisata serta pelatihan dan pengembangan 17 sub sektor ekonomi kreatif dalam rangka menuju Kabupaten Kebumen sebagai Kabupaten/ Kota Kreatif Indonesia.
3. Tentang permintaan penjelasan Fraksi Partai Nasdem atas langkah prioritas seperti yang akan dilakukan terhadap tema pembangunan tahun 2023 “Pemantapan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Perekonomian dan Pertanian serta Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia.” kami sampaikan bahwa hal tersebut akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah melalui :
 - 1) pemantapan penyelenggaraan jalan kabupaten pendukung aktivitas ekonomi;
 - 2) peningkatan penyediaan sistem irigasi;

- 3) peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan;
 - 4) serta peningkatan cakupan pelayanan air bersih.
- b. Pengembangan perekonomian melalui:
- 1) peningkatan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produksi komoditas pertanian bernilai tinggi;
 - 2) penguatan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan, peningkatan produksi pangan/pertanian yang banyak dikonsumsi masyarakat serta pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan;
 - 3) pengembangan serta memperkuat klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal dalam rangka pemerataan pengembangan ekonomi wilayah seperti pengembangan kampung garam, gula semut, sapi PO, anyaman pandan, dsb;
 - 4) peningkatan skala ekonomi koperasi dan UMKM melalui inkubasi wirausaha dan subsidi bunga bagi pelaku UMKM;
 - 5) pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai even seperti penyelenggaraan Kebumen International Expo (KIE), kerjasama pengelolaan obyek wisata antara pemerintah Kabupaten dengan BUMDESMA serta pengembangan ekonomi kreatif;
 - 6) pengembangan peluang investasi melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum serta

mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja; serta

7) pengendalian inflasi dengan menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang.

c. Peningkatan profesionalisme aparatur melalui:

1) peningkatan kualitas pelayanan publik;

2) peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan publik; serta

3) peningkatan kualitas penguasaan teknologi informasi dan komunikasi ASN.

d. Peningkatan kualitas SDM melalui:

1) peningkatan kualitas dan akses pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; serta

2) peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4. Terhadap pendapat Faraksi Partai Nasdem bahwa Pemerintah daerah perlu melakukan langkah yang progressive terkait penggunaan anggaran baik untuk program, kegiatan dan kerjasama dengan berbagai stakeholder untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, kami sampaikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas II pembangunan Tahun 2023 yang terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olahraga, serta perpustakaan dengan total anggaran sebesar Rp.1.511.924.354.286,00 atau sebesar 53,63%.

Berdasarkan proporsi anggaran adalah yang terbesar dari kelima prioritas karena didalamnya termasuk belanja mandatory pendidikan yang minimal 20% dan belanja mandatory kesehatan yang minimal 10%. Prioritas ini difokuskan untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan sebagai modal utama peningkatan kualitas SDM.

Disamping itu terkait dengan anggaran untuk program, kegiatan dan kerjasama dengan stakeholder dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya pada bidang pendidikan digunakan untuk :

- a. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - b. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - c. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - d. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
 - e. Kerjasama dengan The Semeru dalam kebijakan pendidikan untuk mendukung evidence-based policy.
5. Permintaan penjelasan Fraksi Partai Nasdem terhadap proporsi alokasi anggaran untuk masing-masing skala prioritas dalam 5 (lima) rencana prioritas pembangunan tahun 2023, agar konsisten dan fokus menjabarkan pada lima prioritas program dalam RKA masing-masing OPD, kami sampaikan terimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Partai Nasdem, selaras dengan hal

tersebut dapat kami jelaskan bahwa terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan Tahun 2023 dengan proporsi alokasi anggaran sebagai berikut:

- a. Prioritas I peningkatan profesionalisme aparatur dengan total anggaran Rp.883.647.884.212,00 atau sebesar 31,34%;
 - b. Prioritas II peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan total anggaran Rp.1.511.924.354.286,00 atau sebesar 53,63%;
 - c. Prioritas III peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan dengan total anggaran Rp.137.878.354.000,00 atau sebesar 4,89%,-
 - d. Prioritas IV pemantapan kualitas infrastruktur wilayah dengan total anggaran Rp.242.204.791.203,00 atau sebesar 8,59%; serta
 - e. Prioritas V peningkatan kondusivitas wilayah dengan total anggaran Rp.43.760.372.746,00 atau sebesar 1,55%.
6. Terhadap harapan Fraksi Partai NasDem agar Pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam proses perencanaan dan perhitungan anggaran termasuk asumsi-asumsi pada perencanaan RAPBD 2023 agar sudah memperoyeksikan perubahan di masyarakat terkait dampak kenaikan harga BBM terhadap kenaikan harga-harga barang pokok dan komoditas lainnya, kami sampaikan terimakasih atas masukan Fraksi Partai

Nasdem, terkait hal tersebut kami sampaikan bahwa pada penyusunan perencanaan RAPBD Tahun 2023 ini telah mengasumsikan terjadinya kenaikan harga atau inflasi dengan batas pertumbuhan ekonomi sebesar 5% sampai dengan 5,50%. Hal ini telah tercantum pada KUA PPAS Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa salah satu penerapan kebijakan ekonomi daerah yaitu pengendalian inflasi dengan menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang terutama pada produk yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin dalam rangka pengendalian garis kemiskinan serta kebutuhan pokok masyarakat. Langkah implementatif melalui kebijakan ekonomi yaitu:

- a. Optimalisasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID);
- b. Pemberian subsidi bunga bagi pelaku UMKM;
- c. Penguatan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan, peningkatan produksi pangan/pertanian yang banyak dikonsumsi masyarakat seperti bawang merah dan cabai serta pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan; serta
- d. Peningkatan penggunaan produk lokal melalui program unggulan demen mBumen dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Nomor 000/118 Tahun 2019 tentang ASN Bela Beli Produk UMKM serta implementasi katalog lokal bagi belanja pemerintah Kabupaten.

Sedangkan langkah implementatif melalui perlindungan sosial yaitu:

- a. Perluasan kesempatan kerja;

- b. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
 - c. Pemberian dana talangan bagi petani dan nelayan;
 - d. Penyelenggaraan padat karya tunai; serta
 - e. Pemberian bantuan sosial permakanan.
7. Terhadap permintaan Fraksi Partai Nasdem agar dalam peningkatan belanja sarana dan prasarana infrastruktur dalam pelaksanaannya dapat berjalan merata, kualitas dan mutu tinggi, serta sasaran program tersebut harus memperhatikan dinamika pembangunan daerah, kami sampaikan terimakasih atas masukannya, terkait hal tersebut kami sampaikan bahwa belanja infrastruktur pada Tahun 2023 akan dilaksanakan secara optimal, melalui :
- a. Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku dan mendorong penggunaan katalog lokal;
 - b. Penyusunan dokumen kontrak berdasarkan spesifikasi teknis yang tepat;
 - c. Perangkat Daerah terkait meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi termasuk dengan melibatkan Tim di Tingkat Kabupaten yang diampu oleh Bagian Pembangunan Setda; serta
 - d. Konsultan pengawas melaksanakan tugas sesuai dengan SOP.
8. Harapan Fraksi Partai Nasdem atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023 nantinya mampu menjawab kebutuhan, masalah, tantangan dan

kondisi saat ini dan yang akan datang guna mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kebumen selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Kebumen, kami sampaikan terimakasih atas dukungannya, terkait hal tersebut kami sampaikan bahwa APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 disusun dalam rangka mencapai target-target pembangunan daerah dalam bentuk indikator dan target kinerja tujuan dan sasaran daerah. Sebagai tanggung jawab, seluruh indikator dan target kinerja akan ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Kebumen dari staf sampai dengan pejabat Eselon 2 pada Tahun 2023. Selain itu akan terus dioptimalkan monitoring, pengendalian dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan lokus, fokus dan target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan yang pada akhirnya akan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kebumen.

B. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Golongan Karya

1. Terhadap permintaan penjelasan Fraksi Partai Golkar tentang upaya memaksimalkan proyeksi anggaran Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi riil Kabupaten Kebumen sehingga pemasukan bisa dimaksimalkan dan pengeluaran lebih terkontrol ditengah kondisi ekonomi global yang kurang baik,

kami mohon do'a restunya agar PAD yang telah ditetapkan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan dan harapannya bisa melampaui. Sedangkan untuk pengeluaran akan diupayakan agar realisasinya efisien dan maksimal pengeluaran sebesar anggaran belanjanya.

2. Permintaan penjelasan Fraksi Partai Golongan Karya atas upaya memaksimalkan proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai program kegiatan dan target kinerja dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pada 5 (lima) program pembangunan prioritas tahun 2023 yang ditetapkan dengan mendasarkan peraturan daerah yang ada, kami sampaikan bahwa APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 disusun dalam rangka mencapai target-target pembangunan daerah dalam bentuk indikator dan target kinerja tujuan dan sasaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Sebagai tanggung jawab, seluruh indikator dan target kinerja akan ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Kebumen dari staf sampai dengan pejabat Eselon 2 pada Tahun 2023. Selain itu juga telah ditentukan lokus dan fokus program, kegiatan dan sub kegiatan agar lebih tepat sasaran. Kebijakan belanja daerah Tahun 2023 juga telah dialokasikan secara efisien melalui analisis standar belanja dan dalam pelaksanaan nantinya akan terus dilakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan

lokus, fokus dan target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan yang pada akhirnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Selain itu, kebijakan belanja daerah Tahun 2023 dialokasikan secara efisien melalui analisis standar belanja dalam rangka:

- a. Pemenuhan alokasi persentase belanja *mandatory* yaitu untuk pendidikan minimal sebesar 20% dan kesehatan minimal 10% sebagaimana amanat perundang-undangan. Sedangkan alokasi belanja *mandatory* untuk infrastruktur, peningkatan kapasitas ASN dan pengawasan (APIP) disesuaikan dengan potensi pendanaan yang ada;
- b. Pemenuhan alokasi belanja untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
- c. Pencapaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026; serta
- d. Upaya pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan komoditas unggulan pertanian, pemberdayaan UMKM, pengembangan pariwisata serta peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat sekaligus untuk mengurangi angka kemiskinan.

3. Permintaan penjelasan Fraksi Partai Golongan Karya agar diuraikan alokasi belanja modal yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dibidang pembangunan fisik maupun ekonomi dengan tujuan dan sasaran yang tepat, kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut antara lain pada program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp249.375.000,00; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebesar Rp3.485.795.600,00; Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp617.351.000,00; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan sebesar Rp7.348.000.000,00.
4. Terhadap permintaan penjelasan upaya untuk mewujudkan penyeimbangan belanja daerah dengan tujuan dan sasaran program 5 (lima) prioritas pembangunan, kami sampaikan bahwa RAPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 telah disusun selain untuk mencapai target-target pembangunan, juga telah ditentukan lokus dan fokus program, kegiatan dan sub kegiatan agar lebih tepat sasaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah Tahun 2023 dialokasikan secara efisien melalui analisis standar belanja dalam rangka :
 - a. Pemenuhan alokasi persentase belanja *mandatory* yaitu untuk pendidikan minimal sebesar 20% dan kesehatan minimal 10% sebagaimana amanat perundang-undangan. Sedangkan alokasi belanja *mandatory* untuk infrastruktur, peningkatan

- kapasitas ASN dan pengawasan (APIP) disesuaikan dengan potensi pendanaan yang ada;
- b. Pemenuhan alokasi belanja untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
 - c. Pencapaian target dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026; serta
 - d. Upaya pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan komoditas unggulan pertanian, pemberdayaan UMKM, pengembangan pariwisata serta peningkatan infrastruktur pendukung perekonomian untuk menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat sekaligus untuk mengurangi angka kemiskinan.

C. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan atas Pertanyaan, Saran, Himbauan serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

1. Terhadap kajian dan strategi dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah yang sudah dilakukan dan dituangkan dalam dokumen RPJMD maupun RKPD namun terhadap target pendapatan asli daerah justru semakin turun, kami sampaikan penjelasan bahwa kondisi perekonomian nasional dan global berpengaruh terhadap PAD, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil kajian yang ada.

2. Terhadap pendapatan dana transfer yang mengalami kenaikan pada RAPBD Tahun 2023 kami sampaikan penjelasan bahwa pendapatan tersebut masih berdasarkan pada asumsi dan pada saatnya akan kami sesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Transfer ke Daerah, manakala ketentuan tersebut telah kami terima.
3. Tentang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada RAPBD Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan kami sampaikan bahwa Pendapatan BOS yang merupakan Pendapatan DAK Non Fisik sesuai ketentuan harus dipindahkan ke Pendapatan Dana Transfer sehingga pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan.
4. Terhadap permintaan agar dilakukan skala prioritas kegiatan dan anggaran yang diarahkan pada kegiatan yang memiliki output, outcome dan benefit yang jelas manfaatnya untuk masyarakat mengingat terbatasnya anggaran belanja pada tahun 2023, kami sependapat dan akan kami perhatikan dalam pelaksanaannya.

D. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Gerindra.

1. Terhadap permintaan penjelasan terhadap upaya penurunan kemiskinan terkait adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) kami sampaikan bahwa

pemberian BLT ini merupakan kompensasi dari kenaikan BBM yang diberikan oleh pemerintah pusat yang dapat dikolaborasikan dengan program kegiatan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya mengatasi kemiskinan yaitu guna mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dalam bentuk bantuan sosial permakanaan, bantuan konsumsi ikan untuk masyarakat miskin dan kegiatan padat karya tunai.

2. Terhadap permintaan penjelasan atas masih tingginya tingkat ketergantungan pendapatan daerah terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat dimana Pendapatan Asli Daerah rata-rata realisasi selama lima tahun sebesar 14,15% dari yang ditargetkan, kami sampaikan bahwa hal ini merupakan indikasi Pendapatan Asli Daerah baru mampu untuk membiayai belanja daerah sebesar $\pm 14,15\%$. Adapun upaya untuk mengurangi ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat dengan upaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah berdasarkan pada regulasi yang ada.
3. Terhadap indikator kualitas belanja daerah di Kabupaten Kebumen guna mendorong kinerja prioritas pembangunan dapat kami sampaikan penjelasan bahwa belanja daerah pada RAPBD Kabupaten Kebumen tahun 2023 disusun untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pencapaian target-target pembangunan daerah dengan mengacu pada dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan efektif, efisien dan ekonomis.

4. Terhadap permintaan penjelasan terkait masih tingginya belanja gaji pegawai dan belanja operasional dalam APBD 2023, yang mana presentase belanja pegawai sudah melebihi 30 % kami sampaikan penjelasan bahwa belanja pegawai tidak hanya digunakan untuk pembebanan rekening Gaji dan Tunjangan ASN, namun digunakan pula untuk pembebanan rekening belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah, Tambahan Penghasilan ASN, Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tunjangan Profesi Guru, Belanja Honorarium, Gaji Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD, Belanja Tunjangan Reses DPRD, Belanja Tunjangan Perumahan DPRD, Belanja Tunjangan Transportasi DPRD. Dengan demikian akumulasi belanja pegawai persentasenya lebih dari 30%.
5. Tentang permintaan penjelasan atas pemenuhan alokasi belanja mandatory untuk infrastruktur yang akan disesuaikan dengan potensi pendanaan yang ada, kami sampaikan terimakasih atas saran dan masukannya, akan kami perhatikan dan disesuaikan dengan skala prioritas. Sedangkan terhadap batas minimal untuk belanja infrastruktur yang harus dipenuhi oleh semua pemerintah daerah dan kondisi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen, kami sampaikan terimakasih dan akan kami kaji sesuai dengan skala prioritas pembangunan. Sedangkan data atau informasi publik mengenai keberadaan infrastruktur di seluruh wilayah

Kabupaten Kebumen dapat diketahui dengan mengakses portal Satu Data Kebumen.

6. Terhadap upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 dapat kami sampaikan ada beberapa langkah konkrit mengenai upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 yaitu:
 - a. Pemberian subsidi bunga bagi pelaku UMKM;
 - b. Peningkatan penggunaan produk lokal melalui program unggulan demen mBumen dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Nomor 000/118 Tahun 2019 tentang ASN Bela Beli Produk UMKM serta implementasi katalog lokal bagi belanja pemerintah Kabupaten.
 - c. Perluasan kesempatan kerja;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
 - e. Pemberian dana talangan bagi petani dan nelayan; serta Penyelenggaraan padat karya tunai.
7. Terhadap saran agar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dijadikan sebagai langkah awal dalam mewujudkan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, serta stabilisasi daerah guna menuju masa depan yang lebih baik, kami sependapat dan mohon dukungannya. Sedangkan terhadap permintaan agar penyerapan anggaran nantinya bukan hanya sekedar terserap saja, namun juga memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah, kami sependapat

dan akan kami perhatikan, terima kasih atas perhatiannya.

E. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

1. Terhadap permintaan pencermatan kembali apabila Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 telah terbit, kami sampaikan terima kasih atas masukannya dan akan kami lakukan pencermatan secara menyeluruh utamanya terhadap hal-hal yang secara substansi merupakan ketentuan baru yang belum diatur dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun sebelumnya.
2. Atas pencermatan terhadap batang tubuh Raperda, kami sampaikan terima kasih atas koreksinya dan akan kami sesuaikan pada finalisasi Raperda sebagaimana mestinya.
3. Terkait prosentase proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD 2023, dapat kami sampaikan penjelasan bahwa penyusunan proyeksi PAD pada RAPBD 2023 mendasari RKPD yang disusun tahun 2021 dengan mempertimbangkan kondisi Covid 19 pada saat masih mewabah, sedangkan target PAD pada RAPBD-P 2022 mendasari kondisi riil tahun berjalan, sehingga target PAD pada RAPBD-P 2022 lebih tinggi dari Target PAD RAPBD 2023. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih atas masukannya terkait

pendapatan retribusi daerah yang selalu belum bisa memenuhi target dan terhadap hal ini kami akan melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan OPD pengelola pendapatan Retribusi untuk memaksimalkan kinerja dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

4. Terhadap permintaan agar dalam pelaksanaa belanja daerah untuk menerapkan prinsip efektif, efisien dan ekonomis (3E), sehingga tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah yang telah dicanangkan dapat tercapai, akan kami perhatikan dalam pelaksanaannya bersama SKPD terkait.
5. Terhadap harapan agar alokasi pembiayaan terutama perhitungan angka SiLPA telah diperhitungkan dengan matang, akan kami upayakan dengan memperhatikan pada data-data perhitungan realisasi anggaran yang ada.
6. Terhadap saran agar dilakukan antisipasi terkait inflasi yang masih memungkinkan terjadi pada tahun mendatang akibat kenaikan harga BBM, kami sampaikan terima kasih atas masukannya. Terkait hal tersebut kami sampaikan terdapat beberapa langkah solusi guna mengatasi inflasi melalui kebijakan ekonomi yaitu:
 - a. Optimalisasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
 - b. Pemberian subsidi bunga bagi pelaku UMKM
 - c. Penguatan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan, peningkatan produksi pangan/pertanian yang banyak dikonsumsi masyarakat seperti

bawang merah dan cabai serta pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan

- d. Peningkatan penggunaan produk lokal melalui program unggulan demen mBumen dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Nomor 000/118 Tahun 2019 tentang ASN Bela Beli Produk UMKM serta implementasi katalog lokal bagi belanja pemerintah Kabupaten

Sedangkan langkah melalui perlindungan sosial yaitu:

- a. Perluasan kesempatan kerja
 - b. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil
 - c. Pemberian dana talangan bagi petani dan nelayan
 - d. Penyelenggaraan padat karya tunai; serta
 - e. Pemberian bantuan sosial permakanan
7. Terhadap permintaan agar dilakukan kolaborasi dengan Pemerintahan Desa, masyarakat dan swasta terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor pariwisata, kami sampaikan terima kasih atas masukannya dan terhadap hal ini akan kami kaji terlebih dahulu dengan tetap melakukan koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan agar potensi pendapatan dapat lebih tergal.
 8. Terhadap himbauan agar kita tetap menjaga kondusivitas wilayah seiring dengan naiknya tensi politik pada tahun 2023, kami sependapat dan terima kasih.

F. Jawaban / Tanggapan dan Tambahan Penjelasan Atas Pertanyaan, Saran, Himbauan Serta Pendapat dan Keputusan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

1. Terkait apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen yang telah mampu menyusun Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang penuh lika liku dan dinamika sebagaimana disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kami ucapkan terimakasih.
2. Terhadap permintaan penjelasan terkait strategi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mendukung program pemerintah pusat terkait penanganan dampak BBM maupun program Pemerintah Kabupaten Kebumen sendiri dalam menyikapi dampak kenaikan harga BBM, kami sampaikan bahwa upaya yang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Optimalisasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID);
 - b. Pemberian subsidi bunga bagi pelaku UMKM;
 - c. Penguatan ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan, peningkatan produksi pangan/pertanian yang banyak dikonsumsi masyarakat seperti bawang merah dan cabai serta pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan; serta
 - d. Peningkatan penggunaan produk lokal melalui program unggulan demen mBumen dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Nomor 000/118 Tahun 2019 tentang ASN Bela Beli Produk UMKM serta implementasi katalog lokal bagi belanja pemerintah Kabupaten.

Sedangkan strategi melalui perlindungan sosial yaitu:

- a. Perluasan kesempatan kerja;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
 - c. Pemberian dana talangan bagi petani dan nelayan;
 - d. Penyelenggaraan padat karya tunai; serta
 - e. Pemberian bantuan sosial permakanaan.
3. Terkait apresiasi dalam proses pemulihan ekonomi, dimana rencana penerimaan PAD pada APBD 2023 di prediksi sedikit bertambah dari APBD Perubahan 2022 sebagaimana disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kami ucapkan terima kasih
 4. Terhadap permintaan penjelasan terkait pendapatan retribusi daerah yang kurang maksimal, kami sampaikan bahwa terkait dengan hal ini akan kami lakukan evaluasi dan koordinasikan dengan OPD pengelola pendapatan retribusi guna memaksimalkan kinerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
 5. Terhadap permintaan penjelasan terkait rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang mana dalam Raperda ini rencana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih sebesar Rp 2.766.309.374.000,00 kami sampaikan penjelasan bahwa taget pendapatan sebesar Rp 2.766.309.374.000,00 merupakan pendapatan secara total. Sedangkan pendapatan transfer tahun 2023 sebesar Rp 2.350.767.367.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pendapatan Transfer :	2.350.767.367.000
-----------------------	-------------------

Terdiri dari :

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.193.275.944.000
a) Dana Perimbangan	1.756.519.571.000
b) Dana Insentif daerah	20.000.000.000
c) Dana Desa	416.756.373.000
2) Pendapatan Transfer Antar Daerah	157.491.423.000
Pendapatan Bagi Hasil	157.491.423.000

6. Terhadap permintaan penjelasan terkait APBD harus dibelanjakan terhadap produk produk UMKM secara optimal kami sampaikan penjelasan bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen akan mengupayakan agar APBD di belanjakan pada produk produk UMKM, baik berupa barang maupun jasa, dengan tetap memperhatikan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dalam rangka memulihkan dan meningkatkan kegiatan UMKM, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, serta mengurangi angka kemiskinan. APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2023 juga akan dioptimalkan untuk penggunaan produk lokal melalui program unggulan demen mBumen dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Nomor 000/118 Tahun 2019 tentang ASN Bela Beli Produk UMKM serta implementasi katalog lokal bagi belanja pemerintah Kabupaten.
7. Terhadap permintaan penjelasan terkait jumlah total belanja daerah dalam rangka pengentasan kemiskinan kami sampaikan bahwa target angka kemiskinan pada tahun 2023 sesuai target RPJMD yaitu sebesar 15%-

16%. Pencapaian target tersebut akan diupayakan melalui 3 kelompok kebijakan yaitu :

- a) pengurangan beban pengeluaran dengan anggaran sebesar Rp209.448.024.520,00,
- b) peningkatan pendapatan dengan anggaran sebesar Rp25.178.647.600,00 serta
- c) pengurangan kantong kemiskinan dengan anggaran sebesar Rp126.118.326.873,00

Dengan demikian total anggaran dalam rangka pengentasan kemiskinan pada RAPBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp360.744.998.993,00.

8. Terhadap permintaan penjelasan terkait Program Bea Siswa Santri pada Tahun Anggaran 2023 kami sampaikan penjelasan bahwa anggaran direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 yang diberikan kepada Santri Pondok Pesantren Kurang Mampu dan pada usia sekolah. Adapun sasaran penerima diberikan kepada 13 (tiga belas) Pondok Pesantren, dengan total santri 1.000 (seribu) orang, berupa uang bantuan sosial sebesar @ Rp. 3.000.000,00 dalam satu tahun.

Adapun Pondok Pesantren penerima manfaat program BASUH SANTRI terdiri dari:

- a) Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu, Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen
- b) Pondok Pesantren Al Istiqomah, Desa Tanjungsari Kecamatan Petanahan
- c) Pondok Pesantren Darussalam, Desa Adikarso Kecamatan Kebumen

- d) Pondok Pesantren Al Hidayah , Kelurahan Bumirejo
Kecamatan Kebumen
 - e) Pondok Pesantren Tathmainnul Quluub, Kelurahan
Tamanwinangun Kecamatan Kebumen
 - f) Pondok Pesantren Al Mujahiruna Wal Anshor, Desa
Sidogede Kecamatan Prembun
 - g) Pondok Pesanter Mamba'ul Hisan, Desa Sitibentar
Kecamatan Mirit
 - h) Pondok Pesantren Nurul Falah , Desa Jabres
Kecamatan Sruweng
 - i) Pondok Pesantren Al Hasani, Desa Jatimulyo
Kecamatan Alian
 - j) Pondok Pesantren Al Islam, Desa Kawedusan
Kecamatan Kebumen
 - k) Pondok Pesantren Al Azhar , Desa Kalijaya
Kecamatan Alian
 - l) Pondok Pesantren, Al Istiqomah, Desa Karangsari
Kecamatan Kebumen
 - m) Pondok Pesantren An Nahdiyah, Desa Demangsari
Kecamatan Ayah
9. Terkait dengan besaran penganggaran program SIBUSAH pada RAPBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp225.000.000,00 sedangkan program BASUH dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00, sehingga total Rp3.225.000.000,00 atau sebesar 0,11% dari total belanja daerah.
10. Terhadap permintaan penjelasan terkait dengan rincian dan penjelasan mengenai Penyertaan Modal di Tahun

2023 pada masing-masing BUMD di Kabupaten Kebumen yang total anggarannya sebesar Rp. 24.231.000.000,00 sebagai berikut:

NO.	B U M D	Jumlah Penyertaan Modal (Rp.)
1	PT Bank Kebumen (Perseroda)	1.500.000.000
2	PT Luk Ulo Farma (Perseroda)	1.000.000.000
3	PT BPR BKK Kebumen (Perseroda)	4.000.000.000
4	Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa	4.000.000.000
5	Bank Jateng	10.731.000.000
6	PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	500.000.000
7	PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)	2.500.000.000
TOTAL		24.231.000.000

Dari rincian diatas untuk point nomor 1 (satu) s/d point nomor 6 (enam) jumlah yang akan disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen dan telah disesuaikan dengan rencana bisnis masing-masing BUMD, adapun untuk point nomor 7 (tujuh) sejumlah Rp.2.500.000.000,- saat ini dalam proses pembahasan dengan DPRD untuk perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen dalam rangka pemenuhan modal dasar dan modal disetor pada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Kebumen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perusahaan
Perseroan Daerah Aneka Usaha Kebumen Jaya

II. PENUTUP

Dewan dan hadirin yang terhormat.

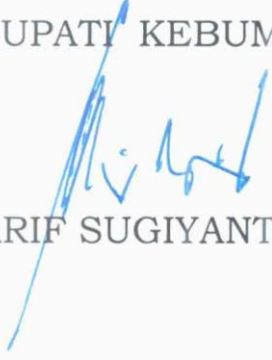
Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf manakala Nota Jawaban/Tambahan penjelasan ini masih ada kekurangannya, namun kami berharap Jawaban dan Tambahan Penjelasan ini dapat lebih memperjelas hal-hal yang dipertanyakan.

Semoga Alloh Subkhanahu Wata'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Kebumen, 21 September 2022

BUPATI KEBUMEN

H. ARIF SUGIYANTO, SH.

